



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURCAHYO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **174570**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/80 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 488.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 87.550.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 176.606.216**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.382.156.216

III. HUTANG Rp. 536.131.153**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.846.025.063

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.